

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum," 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 12th ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Fadjar, A. Mukthie. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, Dan Demokrasi Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, Dan Kepala Daerah Dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*. 1st ed. Malang: Setara Press, 2013.
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Edited by A. Setiawan Abadi. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Juan, J. Linz. *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat Belajar Dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*. 1st ed. Bandung: Mizan, 2001.
- Kurniawan, Mahendra. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*. 1st ed. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Labolo, Muhadam, Teguh Ilham. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategi*. Cetakan ke. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Mayo, Henry B. "An Introduction to Democratic Theory." *Oxford University Press*, 1960.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 38. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mustafa, Delly. "Birokrasi Pemerintahan." In *Birokrasi Pemerintahan, Revisi.*, 214. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Nasution, Adnan Buyung. *Demokrasi Konstitusional: Pikiran & Gagasan*. Edited by Tri Agung Kristanto. Jakarta: Kompas, 2011.
- Ni'matul Huda, Imam Nasef, M. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*

*Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.

Triatmojo, Subidyo. *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak Dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*. 1st ed. Jakarta: Jakarta Ghalla Indonesia, 1983.

Reilly, Thom, Jacqueline S. Salit, and Omar H. Ali. "Developing Democracy." *The Independent Voter*, 2022. <https://doi.org/10.4324/9781003240808-11>.

### **Peraturan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Kode Etik Pegawai

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Noor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

### **Jurnal dan Lain-lain**

Abd. Choliq. "Pentingnya Netralitas Pegawai ASN Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Untuk Pemilu Damai," 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16769/Pentingnya-Netralitas-Pegawai-ASN-Menjaga-Persatuan-dan-Kesatuan-untuk-Pemilu-Damai.html#:~:text=Sesuai dengan Pasal 9 UU,pemilu untuk menyalurkan hak pilihnya.>

Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum," 2009.

Asshiddqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 12th ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Bawamenewi, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negara." *Warta Dharmawangsa* 13, no. 3 (2019): 1–23.

Daniarsyah, Dida. "Bureucratic Political and Neutrality of Bureucracy in Indonesia." *Jurnal Ilmju Politik Dan Komunikasi* 5, no. 2 (2015): 85–94.

- Erick. "Pentingnya Netralitas ASN Dalam Menjaga Demokrasi Dan Menjamin Keadilan Dalam Pelayanan Publik," 2022.  
<https://pekanbaru.bkn.go.id/home/2022/08/14/pentingnya-netralitas-asn-dalam-menjaga-demokrasi-dan-menjamin-keadilan-dalam-pelayanan-publik/>.
- Fadjar, A. Mukthie. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, Dan Demokrasi Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, Dan Kepala Daerah Dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*. 1st ed. Malang: Setara Press, 2013.
- Gedeona, Hendrikus Triwibawanto. "Birokrasi Dalam Praktiknya Di Indonesia: Netralitas Atau Partisan?" *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 10, no. 2 (2013): 232–45.
- Guritno, Tatang, Palupi annisa auliani. "Apa Saja Yang Tak Boleh ASN Lakukan Biar Tak Langgar Asas Netralitas?," 2019.  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/03/07130081/apa-saja-yang-tak-boleh-asn-lakukan-biar-tak-langgar-asas-netralitas->.
- Hartini, Sri. "Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (Pns)." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (2009): 258–67.  
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.237>.
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Edited by A. Setiawan Abadi. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Juan, J. Linz. *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat Belajar Dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*. 1st ed. Bandung: Mizan, 2001.
- Kurniawan, Mahendra. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*. 1st ed. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Kusniati, Retno. "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011).
- Labolo, Muhadam, Teguh Ilham. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia : Teori, Konsep Dan Isu Strategi*. Cetakan ke. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

- "Makalah\_kritikan\_terhadap\_konsep\_birokrasi," n.d.
- Malik, Asrul Septian. "Bawaslu Tindak 7 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN Sepanjang 2022-2023," 2023. <https://m.lampost.co/berita-bawaslu-ditindak-7-kasus-pelanggaran-netralitas-asn-sepanjang-2022-2023.html>.
- Marbun, S F. "Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 5, no. 10 SE-Articles (December 5, 2016): 69–77. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6958>.
- Martini, Rina. "Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013." *JURNAL ILMU SOSIAL; Volume 14, Issue 1, Year 2015DO - 10.14710/Jis.14.1.2015.66-78*, n.d. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/12757>.
- Mayo, Henry B. "An Introduction to Democratic Theory." *Oxford University Press*, 1960.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 38. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mustafa, Delly. "Birokrasi Pemerintahan." In *Birokrasi Pemerintahan*, Revisi., 214. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Nasution, Adnan Buyung. *Demokrasi Konstitusional : Pikiran & Gagasan*. Edited by Tri Agung Kristanto. Jakarta: Kompas, 2011.
- Ni'matul Huda, Imam Nasef, M. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Nurul Qomar. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi : Human Rights in Democratic the Rechtsstaat / Nurul Qomar*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Perdana, Gema. "Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 109–28. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177>.

- Puspitasari, Sri Hastuti. "Pemilu Dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 25 SE-Articles (June 7, 2016): 135–48. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art11>.
- Ramadhanti, Rika. "Politik Dan Birokrasi Pemerintahan." *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (2018): 96. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1242>.
- Reilly, Thom, Jacqueline S. Salit, and Omar H. Ali. "Developing Democracy." *The Independent Voter*, 2022. <https://doi.org/10.4324/9781003240808-11>.
- Rusdiyani, Novita. "KASN-Bawaslu Rilis Data Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2019 Dan 2020," 2020. <https://ppid.kasn.go.id/kasn-bawaslu-rilis-data-pengawasan-netralitas-asn-tahun-2019-dan-2020/>.
- Satrio, Bhakti. "Bawaslu Ingatkan Netralitas ASN Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Jurdil," 2023. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-ingatkan-netralitas-asn-wujud-penyelenggaraan-pemilu-yang-jurdil>.
- Siagian, Abdhy Walid, Fadhillah Arinny, Mareta Puri Nur Ayu Ningsih, and Trisna Septyan Putri. "Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara." *Civil Service Journal* 16, no. 2 (2023): 43–55. <https://doi.org/10.61133/pns.v16i2.375>.
- Thoha, Miftah. "Birokrasi Dan Politik Di Indonesia," 2021. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/07/16/ birokrasi-dan-politik-di-pemerintahan>.
- . *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Jakarta Prenada Media Group 2005, 2005.
- TimPokjaWasdal. "Jenis Pelanggaran Dan Sanksi Netralitas ASN Selama Pemilu 2024," 2024. <https://www.bkn.go.id/jenis-pelanggaran-dan-sanksi-netralitas-asn-selama-pemilu-2024-2/#:~:text=Adapun sanksi netralitas berupa pelanggaran,bulan%2C pembebasan jabatan selama 12>.
- Triatmojo, Subidyo. *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak Dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*. 1st ed. Jakarta: Jakarta Ghalla Indonesia, 1983.

Umum, Komisi Pemilihan. "Sejarah KPU," n.d. <https://kpu-mojokertokab.go.id/page/read/32/sejarah-kpu>.

Yunandi, Aqzal Maulana. "Teori Birokrasi Max Weber." *Http://Eprints.Pknstan.Ac.Id/*, 2021, 1–25.